



**PENGADILAN NEGERI  
PALANGKARAYA**

# **Laporan Tindak Lanjut SKM Triwulan IV PN Palangkaraya 2025**

Pengadilan Negeri Palangkaraya  
Jl. Diponegoro No. 21  
Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya  
Kalimantan Tengah, 73111  
<https://pn-palangkaraya.go.id>  
[surat@pn-palangkaraya.go.id](mailto:surat@pn-palangkaraya.go.id)  
Telp. (0536) 3221870

© Kepaniteraan Hukum PN Palangkaraya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR PELAKSANAAN**

Laporan realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen perbaikan mutu pelayanan publik di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dasar penyusunan laporan ini adalah:

1. Landasan Regulasi: Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mewajibkan adanya evaluasi dan tindak lanjut perbaikan berkelanjutan.
2. Hasil Monev Triwulan IV: Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV Tahun 2025 Pengadilan Negeri Palangkaraya , yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 6 Januari 2026.
3. Fokus Tindak Lanjut: Monev tersebut secara spesifik menghasilkan empat Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang wajib dilaksanakan pada periode Triwulan I Tahun 2026. RTL tersebut berfokus pada aspek krusial seperti peningkatan sarana prasarana, transparansi pengaduan, dan penguatan integritas anti-pungli, guna mempertahankan capaian IKM 100,00%.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Laporan ini dimaksudkan sebagai alat manajemen strategis yang berfungsi untuk:

- a. Pertanggungjawaban Implementasi: Melaporkan dan mempertanggungjawabkan secara transparan serta akuntabel status realisasi dan implementasi dari seluruh Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang ditetapkan dalam Monev SKM Triwulan IV Tahun 2025.
- b. Validasi Kinerja: Menyajikan data dan bukti dokumentasi yang valid (terkait status progress dan penyelesaian) dari setiap RTL sebagai validasi kinerja Tim Mutu Pelayanan.

#### **2. Tujuan**

Tujuan utama penyusunan dan pelaksanaan laporan ini meliputi:

- a. Kepastian Pelaksanaan: Memastikan bahwa komitmen perbaikan mutu pelayanan publik yang dicanangkan Pengadilan Negeri Palangkaraya dilaksanakan secara terukur, tercatat, dan sesuai target waktu (Triwulan I Tahun 2026).

- b. Penyediaan Data Input: Menyediakan data implementasi RTL yang akurat dan komprehensif sebagai input utama bagi penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) SKM Triwulan I Tahun 2026 yang akan datang.
- c. Pengendalian Mutu: Menciptakan mekanisme pengendalian mutu internal dengan memonitor area-area kritis (seperti sarana prasarana, pengawasan, dan integritas) yang menjadi fokus perbaikan berkelanjutan.

**BAB II**  
**REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT**

Berikut adalah tabel matriks monitoring realisasi RTL Triwulan IV 2025 yang telah dilaksanakan selama Triwulan I 2026:

| No. | Aspek Perbaikan                  | Rencana Tindak Lanjut (RTL)                                                                                                                                                                                                                                        | Target Keberhasilan                                                                                                            | Keterangan                                                                              |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Peningkatan Sarana dan Prasarana | Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas ruang tunggu, ruang sidang, dan terutama area layanan publik. Selain itu, akan dilakukan perbaikan dan perawatan fasilitas yang teridentifikasi rusak atau kurang nyaman (seperti AC, kursi, toilet, dan parkir). | Terwujudnya lingkungan pelayanan yang nyaman, bersih, dan fungsional,                                                          | Selesai dilaksanakan, dengan koordinasi antara Pimpinan, Pegawai dan Petugas Kebersihan |
| 2.  | Transparansi dan Akses Pengaduan | Mensosialisasikan kembali laman pengaduan melalui pemasangan <i>banner</i> di kantor, pembaruan di <i>website</i> resmi, dan unggahan di media sosial.                                                                                                             | Peningkatan pemahaman masyarakat tentang mekanisme pengaduan dan peningkatan jumlah kanal pengaduan yang aktif dan terpantau,. | Akan dilaksanakan                                                                       |
| 3.  | Penguatan Akuntabilitas          | Membuat Laporan Monitoring dan                                                                                                                                                                                                                                     | Tersedianya Laporan Monev                                                                                                      | Telah dilakukan monev setiap bulan,                                                     |

|    |                             |                                                                                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                             | Evaluasi (Monev) secara periodik terkait jumlah dan jenis pengaduan yang masuk serta tindak lanjut penyelesaiannya.                 | Pengaduan yang kredibel sebagai alat kontrol internal terhadap penanganan keluhan masyarakat. | <b>untuk memantau pelaksanaan penyelesaian pengaduan</b>                                                                          |
| 4. | <b>Integritas Pelayanan</b> | Melakukan uji petik secara berkala (sidak) pada area pelayanan publik untuk memastikan tidak adanya praktik pungutan liar (pungli). | Terjaminnya pelayanan yang bebas biaya tambahan (kecuali yang resmi),                         | <b>Masing-masing pelayanan memiliki nota PNBPN yang wajib diserahkan kepada pemberi layanan setelah selesai menerima layanan.</b> |

### BAB III

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

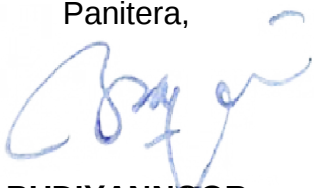
### A. KESIMPULAN REALISASI

Secara umum, realisasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang bersumber dari Monev SKM Triwulan IV Tahun 2025 telah mencapai tingkat implementasi yang sangat memuaskan. Capaian ini diindikasikan dengan penyelesaian program-program fisik dan sosialisasi secara tuntas.

1. Realisasi Tuntas (100%): RTL terkait Peningkatan Sarana dan Prasarana (evaluasi dan perbaikan AC, toilet, kursi di area layanan publik) dan Transparansi dan Akses Pengaduan (sosialisasi laman pengaduan melalui banner, website, dan media sosial) telah selesai dilaksanakan 100%. Penyelesaian ini bertujuan langsung mendukung Unsur Kecepatan Waktu Pelayanan dan Kemudahan Prosedur.
2. Realisasi Berkelanjutan (Dalam Proses: Sementara itu, RTL yang bersifat pengawasan dan manajemen, yaitu Penguatan Akuntabilitas (pembuatan Laporan Monev Pengaduan) dan Integritas Pelayanan (pelaksanaan uji petik anti-pungli), telah dilakukan tahap pertama implementasinya dan laporan awalnya telah diselesaikan. Kedua RTL ini akan terus berlanjut secara berkala (berkelanjutan) selama Triwulan I Tahun 2026 dan menjadi fokus utama untuk dilaporkan secara detail pada Laporan Monev SKM berikutnya.

Demikianlah laporan ini dibuat dan disusun oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA dengan sebenar-benarnya.

Palangka Raya, 9 Januari 2026  
Mengetahui,  
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

Panitera,  
  
**BUDIYANNOOR**



  
**RICKY FARDINAND**